SBD 15-94-110

PENGARAHAN

PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

PADA

APEL WAKAPOLDA, KAPOLWIL, KAPOLWILTABES, KAPOLTABES, KAPOLRES, KAPUSDIK SE-INDONESIA DI SUKABUMI,

Tanggal 17 Januari 1994

Yang terhormat Kapolri beserta staf; segenap Perwira peserta apel sekalian;

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya karena pada saat ini saya dapat bertemu dengan para pimpinan Polri, yang berstatus sebagai manager Polri tingkat menengah, yaitu para Kapoltabes, Kapolres dan Kapusdik, sekaligus manager yang telah beranjak kepada tingkat yang lebih tinggi ialah para Wakapolda, Kapolwil dan Kapolwiltabes.

Dengan pertemuan ini saya berharap dapat lebih mengefektifkan operasionalisasi strategi dan kebijaksanaan Pangab kepada perumus kebijaksanaan di tingkat Polda dan para pelaksana kebijaksaan di tingkat kesatuan operasional, karena dengan bertemunya unsur perumus kebijaksanaan pada tingkat Polda dengan pelaksana, akan dapat menyelaraskan pelaksanaan tugas sehari-hari secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pengemban fungsi pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak bisa terlepas dari kebarusan mengidentifikasi dan menganalisa berbagai peluang dan kendala yang terkandung dalam kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, terutama yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik yang bersifat mudah diramalkan *(predictable)* maupun yang cenderung bergolak *(turbulent)*.

Keadaan semacam ini terjadi karena pembangunan nasional yang telah dirasakan manfaatnya berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, selalu mengandung potensi bagi berkembangnya kejahatan konvensional dan tumbuhnya kejahatan berbentuk baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. Kejahatan dalam bentuk baru tersebut terutama karena adanya lembaga-lembaga dan peluang-peluang baru dalam dunia kehidupan sosial ekonomi dan meningkatnya kadar konflik kepentingan dengan berbagai implikasinya.

Sementara itu arus globalisasi ekonomi dan informasi yang melanda dunia yang tidak mudah terbendung, makin berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Semakin transparannya kehidupan masyarakat seperti itu, akan mempengaruhi segala aspek kehidupan yang muaranya adalah makin meningkatnya faktor korelatif kriminogen yang menjadi pendorong meningkatnya gangguan Kamtibmas baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam bidang politik, berkembang tuntutan berbagai kelompok masyarakat akan nilai-nilai keterbukaan, demokratisasi dan hak asasi manusia, yang sering disalahartikan sebagai keterbukaan dan kebebasan yang acapkali cenderung berbau liberalisme, bahkan dibarengi dengan sikap-sikap yang radikalistik. Keadaan semacam ini tidak jarang mewarnai

berbagai kasus-kasus unjuk rasa, demonstrasi serta usaha-usaha lain yang kadang-kadang bersifat destruktif.

Meningkatnya komunikasi masyarakat kita dengan masyarakat antar bangsa di seluruh dunia, juga tidak terbebas dari masalah, bahkan dibarengi dengan meningkatnya kegiatan sementara lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki ambisi politik tertentu, yang acapkali cenderung memojokkan posisi kita dan mendiskreditkan pemerintah. Kita juga merasakan bahwa dalam berbagai manuver politiknya mereka cenderung mempengaruhi opini dan menggerakkan massa melalui berbagai isu.

Perkembangan pengetahuan politik masyarakat juga mendorong meningkatnya kritik terhadap sistem politik di Indonesia, termasuk di dalamnya Dwi Fungsi ABRI, yang dinilai sebagai alat untuk melegitimasi bagi turut campurnya ABRI dalam bidang politik. Selain karena maraknya liberalisme, juga diakibatkan oleh kurang mantapnya pemahaman terhadap konsep Dwi Fungsi ABRI serta sosialisasinya secara luas dan intensif.

Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan industri dan perdagangan telah meningkatkan peran swasta dalam perekonomian nasional, sehingga meningkatkan rangsangan berusaha yang makin intensif. Dunia bisnis makin berkembang selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat nasional maupun internasional. Keadaan semacam ini memberikan peluang timbulnya kejahatan konvensional dengan modus-modus baru dan kejahatan-kejahatan berdimensi baru pada masing-masing lembaga perekonomian tersebut.

Menghadapi gelagat tersebut pemerintah telah melakukan serangkaian deregulasi dan debirokratisasi yang akan terus diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi yang dapat menjawab tantangan pembangunan di masa datang. Namun peluang ekonomi ini juga mengandung berbagai permasalahan antara lain perhubungan, urbanisasi dan pertanahan, yang acapkali mencuat dalam bentuk pemogokan dan unjuk rasa, menuntut hak-hak buruh yang kesemuanya itu bermuara kepada kecenderungan sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di bidang sosial budaya, telah terjadi perkembangan yang menonjol terutama di bidang hukum dan perundang-undangan, makin terasa meningkatnya pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat, serta perkembangan tingkat pendidikan masyarakat. Makin meningkatnya konsumerisme dan konflik-konflik kepentingan acapkali juga menimbulkan dampak-dampak sosial yang kurang menguntungkan. Sementara itu beberapa indikasi juga menunjukkan adanya gejala dehumanisasi yang cenderung meningkat kadarnya.

Segenap peserta apel sekalian;

Lebih lanjut, kecenderungan di bidang hukum, penting untuk mendapatkan perhatian kita semua. Pembangunan di bidang hukum mengandung konsekuensi makin beratnya tugas-tugas penyidikan tindak pidana bagi unsur criminal justice system, termasuk Polri di dalamnya. Tugas ini semakin berat karena pertambahan undang-undang tidak selalu dapat diikuti secara selaras dengan pertambahan sumber daya penegakan hukum dan perangkat keras lainnya yang seimbang.

Pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat yang diakibatkan selain oleh meningkatnya taraf berpikir, juga karena terbukanya arus informasi dari luar, menuntut kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Keadaan semacam ini menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melakukan kritik kecaman bahkan unjuk rasa ataupun upaya hukum apabila hak-haknya dilanggar. Gelagat tersebut cenderung makin marak di masa datang, terlebih dalam arus menuju kemapanan hukum yang makin maju.

Menyadari gelagat perkembangan yang mengandung tantangan yang sedemikian itu, maka pimpinan ABRI mengambil kebijaksanaan dalam pengelolaan kekuatan Hankam dengan menekankan peningkatan *Sumber Daya Manusianya*. Khusus bagi Polri yang terutama menjadi tantangan adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia tersebut *dihadapkan* kepada perkembangan gelagat tantangan Kamtibmas, yang kesemuanya ber-

pengaruh terhadap citra pertahanan dan keamanan serta Sospol ABRI pada umumnya.

Dalam hubungan ini perlu saya singgung adanya beberapa kasus menonjol yang merugikan kredibilitas ABRI/POLRI dan berdampak politis kurang menguntungkan antara lain adalah:

Pertama, kasus Bantarujeg Majalengka yang menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak.

Kedua, kasus translok Sei Lepan, di mana terjadi penyerangan terhadap Mapolsek Pangkalan Berandan oleh warga Translok.

Ketiga, kasus-kasus perusakan Mapolsek Sliyeg Indramayu oleh warga desa Sleman Kecamatan Sliyeg dan Mapolsek Candibroto Temanggung oleh warga masyarakat dusun Gembayang Desa Rentangsari.

Keempat, ketidakpuasan petani yang terkena proyek real estate Rancamaya Bogor, karena merasa tidak diberikan ganti rugi yang memadai atas tanah yang dipergunakan untuk proyek tersebut. Kasus ini sempat mencuat dan mendapat perhatian masyarakat Internasional.

Kelima, kasus Waduk Nipah Sampang yang mengakibatkan meninggalnya beberapa pengunjuk rasa oleh aparat keamanan. Kasus ini juga mendapat perhatian masyarakat luas dan bahkan masyarakat Internasional.

Keenam, kasus Marsinah di Jawa Timur, yang meninggal karena dibunuh. Kasus ini sempat menjadi isu masyarakat Internasional.

Ketujuh, masalah SDSB yang ditandai dengan aksi unjuk rasa hampir di seluruh wilayah Indonesia, antara lain dengan perusakan toko Cina di Bangkalan.

Kedelapan, masalah-masalah Sara, antara lain kasus perusakan di Pelabuhan Ratu dan perkelahian antar suku seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kalimantan Barat dan Cengkareng Jakarta.

Kesembilan, berbagai kasus perusakan terhadap rumah tempat peribadatan.

Kesepuluh, perusakan dan pembakaran rumah karyawan PT. Indorayon di Sumatera Utara, sebagai protes karena menganggap pengelola pabrik pulp dan keras itu tidak mengindahkan lingkungan hidup dan keselamatan kerja karyawan dan masyarakat sekitarnya.

Kalau kita kaji dari data aktual yang diuraikan di atas, terjadinya permasalahan-permasalahan Kamtibmas yang berdampak politis tersebut dikarenakan antara lain:

Pertama, lemahnya deteksi dini fungsi Intelejen serta lambatnya tindakan pencegahan agar kasus tidak berkembang lebih lanjut.

Kedua, kurangnya ketanggapsegeraan aparat Kamtibmas terhadap hasil deteksi dini gejala-gejala yang berkembang dan mengarah kepada munculnya kasus-kasus tersebut.

Ketiga, lemahnya tingkat profesionalisme para pimpinan dan pelaksana untuk mengatasi situasi kritis yang melibatkan kekuatan massa.

Keempat, lemahnya koordinasi para pejabat ABRI/Polri dengan instansi terkait dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kritis.

Kelima, kelemahan fungsi manajemen terutama penguasaan *data awal* dan fungsi pengendalian di lapangan.

Keenam, kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian senjata api organik kepada anggota.

Ketujuh, kurangnya penekanan pelaksanaan tugas termasuk protap-protap pengamanan personil dan pengamanan kegiatan terhadap para anggota yang akan melaksanakan tugas.

Kedelapan, kurang mantapnya profesionalisme Binmas terutama kurangnya pendekatan terhadap para tokoh masyarakat/ulama dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat.

Segenap peserta apel sekalian;

Dengan menganalisa berbagai data dan kelemahan-kelemahan yang ada tersebut, maka *pembinaan sumber daya manusia merupakan tugas yang harus diprioritaskan.* Arah pembangunan sumber daya manusia Polri sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari sistem ABRI, adalah *tumbuhnya manusia-manusia Polri yang profesional* dengan didukung semangat yang tinggi, sehingga menjadi pejuang prajurit dan prajurit pejuang.

Dalam hubungan ini saya ingin menekankan dan mengingatkan kembali, bahwa profesionalisme para pimpinan Polri, baik di bidang pembinaan sumber daya maupun operasional, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, memiliki wawasan yang luas, mampu membaca dan menganalisa perkembangan lingkungan strategi yang berkembang pesat dewasa ini, meningkatkan upaya Binmaspol dalam rangka menumbuhkembangkan peranserta aktif tokoh-tokoh masyarakat seperti: tokoh agama, tokoh kepala adat, ilmuwan, seniman dan generasi muda dalam membantu Polri *memelihara Kamtibmas di lingkup pengaruhnya.*

Kedua, memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap perkembangan lingkungan, sehingga mampu mengidentifikasikan kemampuan yang dimiliki serta memanfaatkan peluang dan mengatasi kendala di luar organisasinya, bahkan mampu merubah kendala itu menjadi peluang.

Ketiga, memiliki daya antisipasi yang tinggi dengan *memanfaatkan analisa intelijen sebagai hasil penginderaan dini* terhadap gejala sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Keempat, memiliki keinginan untuk mengembangkan diri dan bawahannya, terutama dalam kemampuan teknis profesional sebagai syarat peningkatan performansi kesatuan, memperhatikan sungguh-sungguh fungsi pengamanan personil antara lain menyeleksi secara ketat dan tepat baik segi mental maupun kemampuan personil petugas pemegang senjata api untuk mencegah penyimpangan ataupun penggunaan yang berlebihan.

Kelima, memiliki kemampuan menangkap tuntutan pelayanan dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat, karena semakin tingginya kesadaran hukum dan tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat.

Keenam, selalu berusaha meningkatkan kemampuan kepemimpinan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan berdaya guna dan berhasil guna, dalam hubungan ini keteladanan dan kemampuan pengendalian serta pengawasan perlu ditingkatkan. Kita semua merasa prihatin karena masih tingginya angka pelanggaran di lingkungan ABRI pada umumnya, dan juga Polri pada khususnya.

Oleh sebab itu, saya berharap agar fungsi-fungsi pembinaan personil lebih mendapatkan perhatian di masa datang, dengan lebih mengintensifkan pembinaan hukum, disiplin dan tata tertib di semua jajaran Polri dalam menghadapi gejala meningkatnya pelanggaran oleh anggota ABRI dan Polri pada khususnya. Saya berharap agar koordinasi setiap jajaran Polri dengan Polisi militer setempat makin dipererat dan dibudayakan. Hendaknya diperhatikan pula bahwa sesuai dengan SKEP Pangab No. Skep/711/X/1989, tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI, maka pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer.

Ketujuh, selalu berusaha meningkatkan motivasi anggota untuk memberikan yang terbaik kepada kesatuan, salah satu syaratnya adalah, memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan prajurit tanpa harus menempuh cara yang dapat menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

Kedelapan, memiliki etos kerja yang tinggi dilandasi dengan penghayatan bahwa Polri merupakan pengayom masyarakat yang berjiwa prajurit pejuang dan pejuang prajurit.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan eksistensi Dwi Fungsi ABRI menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat dan kompleks, diisyaratkan agar segenap personil Polri memiliki kemampuan yang memadai, terutama adalah:

Kemampuan memenuhi harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri dan tugas kekaryaan/sospol ABRI serta dapat memberika keteladanan kepada masyarakat. Tingkatkan upaya untuk memperbaiki citra Polri, terlebih dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1992, yang pengaruhnya sangat besar terhadap upaya untuk meningkatkan disiplin nasional.

Lebih lanjut agar menjadi perhatian bahwa dalam setiap penanganan dan penyelesaian masalah, jangan terlalu mudah terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan represif yang implikasinya akan cenderung menyulitkan posisi pemerintah.

Sebelum saya akhiri, melalui kesempatan ini, tak lupa pula saya menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap setiap petugas Kepolisian yang telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan efektivitas yang tinggi seperti terlihat pada beberapa kasus akhir-akhir ini.

Para Perwira sekalian;

Demikianlah pengarahan saya pada apel ini, semoga sekembali para Perwira dari apel ini akan merasa lebih percaya diri dalam menatap dan menghadapi tantangan di masa datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Panglima Angkatan Bersenjata

FEISAL TANJUNG
Jenderal TNI